

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN
2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :
DENNISIA GALANG BRAMANA
NPM : 1641010028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

Disusun Oleh :

DENNISIA GALANG BRAMANA

NPM : 1641010028

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Agus Widivarta, M.SI
NIP.371089500451

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. Drs. E. Gendit Sukarno, MS, CHRA
NIP. 195907011987031001

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang
Jalan Kedungdoro Surabaya)

Disusun Oleh :

DENNISIA GALANG BRAMANA

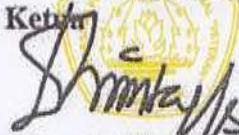
NPM: 1641010028

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal 23
Juli 2021

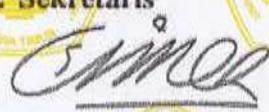
PEMBIMBING


Dr. AGUS WIDIYARTA, M.Si
NIP. 371089500451

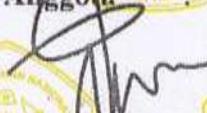
Menyetujui

TIM PENGUJI
1. Ketua

Dr. DIANA HERATI, M.Si
NPT. 196601031989032001

2. Sekretaris


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP.196902101993032001

3. Anggota


Dr. AGUS WIDIYARTA, M.Si
NIP. 371089500451

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Drs. Ec. GENDET SUKARNO MS, CHRA
NIP. 195907011987031001

LEMBAR REVISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang
Jalan Kedungdoro Surabaya)

Disusun Oleh :

DENNISIA GALANG BRAMANA
NPM: 1641010028

Telah direvisi dan disahkan pada tanggal 02 Agustus 2021

Tim Pengaji 1

Tim Pengaji 2

Tim Pengaji 3

Dr. Diana Hertati, M.Si
NIP.196601031989032001

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP.196902101993032001

Dr. Agus Widiyarta M.Si
NIP. 371089500451

IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro
Surabaya)**

Dennisia Galang Bramana

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kedungdoro, Surabaya di ruas-ruas jalan protokol tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya-upaya penertiban pada tiap jalan protokol. Secara terminologi penertiban ini bermakna penggusuran secara permanen ataupun relokasi. Seringkali tindakan ini diwarnai dengan konflik antara pihak penertib maupun pedagang kaki lima (PKL). Fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Kedungdoro, Surabaya dan hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah, satpol PP dan Dinas Kopersi dan UMKM Kota Surabaya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data primer melalui wawancara in depth interview serta observasi dari informan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1. faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut : a. Pihak pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan mengakui bahwa tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak, kemudian, penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan. 2. Disposisi, bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan tersebut serta tugas masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif. 3. Komunikasi, pemerintah kota Surabaya Dan Dinas Koperasi dan UMKM mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima. 5. Struktur Birokrasi, Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan PKL sesuai dengan Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai.

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan dan Penyediaan Ruang,
Pedagang Kaki Lima (PKL)***

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SURABAYA CITY PERDA NO. 9 YEAR 2014 IN ARRANGEMENT AND PROVISION OF SPACE FOR STANDARD TRADERS IN THE CITY OF SURABAYA

(Study on Street Vendors along Jalan Kedungdoro Surabaya)

Dennisia Galang Bramana

The number of street vendors (PKL) in the Kedungdoro area, Surabaya on the protocol roads, makes the Surabaya City Government have to make efforts to control each protocol road. In terms of control, this means permanent eviction or relocation. Often this action is colored by conflicts between the parties in order and street vendors (PKL). The phenomenon that has been seen, of course, has become the duty of all components of society to think more deeply about the problem of street vendors in the Kedungdoro street area, Surabaya and this cannot be separated from the role of the local government, Satpol PP and the Cooperatives and SMEs Service of Surabaya City.

This research method is descriptive qualitative with primary data collection through in-depth interviews and observations from relevant informants. Based on the results of the study that: 1. the factors that influence the success of the implementation of the policy are as follows: a. The policy makers and implementers in the field admit that there is no land available at the location and the number of street vendors is too much, then, controlling, as a last step if street vendors continue to refuse to participate in the arrangement program. 2. Disposition, that the implementer has a good understanding of the implementation of the policy and their respective duties and has a preference for values used in the implementation of the policy. External environmental conditions affect the implementation of structuring policies, namely with a conducive social environment. 3. Communication, the Surabaya city government and the Cooperatives and MSMEs Service involve the community by inviting representatives from street vendors such as the heads of street vendors' associations. 5. Bureaucratic structure, policy standards and policy targets in the implementation of structuring and fostering street vendors in accordance with the City of Surabaya No. 9 of 2014 can be said to be still inadequate.

Keywords: *Policy Implementation, Spatial Planning and Provision, Street Vendors (PKL)*

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kehadirat Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya)

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Widiyarta, S.SOS, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis, serta semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ertien Rining N, M.Si selaku koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur serta Dosen Pembimbing penulis.
4. Ibu Ina Rahmawati P, ST selaku Plt Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha mikro yang telah memberi informasi seputar Dinas Koperasi dan usaha Mikro.
5. Kedua orang tua Dr. Bambang Jatmiko M.M dan Drs. Dyah Hastuti M,Si penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan Skripsi penelitian.
6. Sahabat Tercinta penulis Kezia liziana dan Anindita Hidayat yang mensupport penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.

7. Sahabat penulis Dalbo, Ecky Dwi, Tegar Anugerah, Syahrul Fitroni, Biyan Ady, Bahari Cukong, Dicky Armand, M. Taqiyuddin, Budi Copet, Asif Rachman, Faras rasyid baswedan, Risky Cireng , Lala Tri, Rizal arab, Priantina Ocatvia, Yusrina, Kharisma Dinda, Rafi keket, Andre Presma UPN yang membantu mentoring penulis dalam menyusun Skripsi penelitian.
8. Seluruh Kawan Sejawat Partai Solid Administrasi Publik angkatan 2016 yang sama sama sedang berjuang dan saling support dalam menyelesaikan Skripsi penelitian.

Akhirnya penulis dapat berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan laporan ini.

Surabaya, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Landasan Teori	19
2.2.1. Kebijakan Publik	19
2.2.1.1. Kebijakan Publik Dalam Efektivitas	21
2.2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik	23
2.2.2. Implementasi	24
2.2.2.1. Pengertian Implementasi	24
2.2.2.2. Model Implementasi	25
2.2.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	29
2.2.3. Pedagang Kaki Lima (PKL)	31
2.2.3.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)	31
2.2.3.2. Jenis-jenis Dan Tempat Usaha	33

2.2.3.3. Hak-hak Pedagang Kaki Lima	34
2.2.4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014	34
2.3. Kerangka Berpikir	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya	55
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.....	56
4.1.3. Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.....	58
4.1.4. Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya	59
4.2. Hasil Penelitian.....	61
4.2.1. Sumber Daya Manusia.....	62
4.2.2. Komunikasi	68
4.2.3. Disposisi	73
4.2.4. Struktur Birokrasi	76
4.3. Pembahasan.....	82
4.3.1. Kesiapan Sumber Daya	82
4.3.2. Komunikasi	83
4.3.3. Disposisi	85
4.3.4. Struktur Birokrasi	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kedungdoro, Surabaya Tahun 2019	10
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang	17
Tabel 4.2. Data Pedagang kaki lima (PKL) Dikawasan Kedungdoro, Surabaya.....	61
Tabel 4.1. Hasil Rangkuman Penelitian	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 3.1. Model Interaktif menurut Miles dan Huberman	52
Gambar 4.1. Sosialisasi dan Penyuluhan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya Pada PKL Binaan Kedungdoro, Surabaya, Tahun 2021	72
Gambar 4.2. Sosialisasi dan Penyuluhan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya Pada PKL Binaan Kedungdoro, Surabaya, Tahun 2021	72
Gambar 4.3. SOP Sosialisasi dan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020-2021	81